

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Tenggarong 21 Februari 2022

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara


H. Fida Hurasani, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19731101200012100

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Tupoksi.....	2
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis.....	3
1.5 Uraian Singkat Organisasi.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 Perencanaan Strategis	14
2.2 Perjanjian Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 Capaian Kinerja.....	23
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022	39
BAB IV PENUTUP.....	45
4.1 Kesimpulan.....	45
4.2 Perbaikan Kedepan	46
LAMPIRAN	
Tabel 1.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	5
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan	9
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan	9
Tabel 1.4 Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional	10
Tabel 1.5 Jumlah Tenaga Honoror / THL Menurut Tingkat Pendidikan	10
Tabel 1.6 Jumlah Petugas Operasional Telah Mengikuti Pendidikan dan Latihan Pemadam Kebakaran dan Bencana	10
Tabel 1.7 Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	10
Tabel 1.8 Sarana dan Prasarana Kendaraan Roda Empat dan Roda Enam ..	11
Tabel 1.9 Sarana dan Prasarana Berupa Aset/Tanah/Peralatan/Perlengkapan	11
Tabel 2.1 Potensi, Peluang dan Kendala yang Ada	14
Tabel 2.2 Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	16
Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan	18
Tabel 2.4 Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2022	19
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	20
Tabel 2.6 Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan Data Awal Tahun 2021 dan Target Tahun 2022	22
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	24
Tabel 3.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	24

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya	29
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis	31
Tabel 3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	32
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis	38
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022	40
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun Sebelumnya (2021)	43
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah	47
Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	59
Rekapitulasi Kejadian Kebakaran Per Kecamatan	65
Dokumentasi Pra Bencana	70
Dokumentasi Kegiatan Tanggap Darurat	72
Dokumentasi Kegiatan Pasca Bencana	74
Dokumentasi Kegiatan Pemadam Kebakaran	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 3, Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 42 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bahwa BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata ;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan ;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana ;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD ; dan
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

b. Fungsi

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien ; dan.

2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh .

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Organisasi perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan kebakaran dan bencana di daerah serta berada pada posisi yang sangat strategis karena dapat menentukan tingkat kualitas dalam penanganan kebakaran dan bencana di daerah yaitu dengan melakukan antisipasi pengurangan resiko sebelum bencana terjadi. Selain itu juga memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan mengevaluasi penanganan bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan wilayah rawan akan bencana. Hal ini dikarenakan topografi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang sebagian besar bergelombang dan berbukit dengan kemiringan landai sampai curam. kondisi ini semakin membahayakan jika praktek-praktek sistem pengelolaan sumber daya alam yang tidak seimbang, terkendali dan kurang memperhitungkan faktor lingkungan. Terkait dengan hal ini diperlukan peran yang sangat strategis dalam penanganan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara hendaknya dapat bekerja secara professional untuk keamanan masyarakat dari bencana yang akan terjadi di Kutai Kartanegara. Profesionalisme sangat dibutuhkan dalam penanganan penanggulangan bencana di daerah karena yang akan merasakan dampaknya nanti adalah seluruh masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Salah satu sumber daya yang sangat penting dalam penanganan bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah partisipasi masyarakat, agar partisipasi masyarakat dapat tercurah secara terarah, terkoordinasi dan terkonsolidasi secara efektif maka partisipasi masyarakat perlu dikelola secara tepat.

Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih dirasa belum memadai. Keberadaan kantor masih belum representatif untuk penyelenggaraan organisasi dalam rangka penanganan dan penanggulangan bencana. Kondisi ini menjadi kendala internal organisasi.

Terlepas dari kondisi sarana dan prasarana masih terdapat kelemahan dalam kapasitasnya di sumber daya aparatur terkait dengan kuantitas dan kualitas. Jumlah sumber daya aparatur yang terbatas menjadikan kendala dalam operasional organisasi dan penanganan kebakaran dan bencana di daerah. Selama proses penyelenggaraan organisasi masih belum tersedia sistem ketatalaksanaan yang optimal.

Terdapat pula beberapa hal terkait dengan rawan bencana yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara seperti intensitas bencana yang cukup tinggi yang didasari oleh kondisi topografi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagaimana diketahui bahwa konservasi sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup seringkali menjadi hal yang bertolak belakang. Meski memberikan keuntungan ekonomi yang besar namun ternyata eksplorasi telah mengubah derajat kualitas sumber daya alam. Dampak langsung kegiatan pertambangan diantaranya kerusakan ekologis seperti berkurangnya debit air sungai dan tanah, pencemaran air laut, dan kerusakan hutan hingga sedimentasi tanah. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga dapat meminimalisasi resiko bencana baik secara langsung atau tidak langsung ke masyarakat.

Berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

- a. Di aspek kebijakan Penanggulangan Bencana:
 - a) Belum adanya landasan hukum berkait penanggulangan Kebakaran dan bencana yang komprehensif di Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - b) Sulitnya merubah pendekatan penanggulangan bencana dari pendekatan responsif kependekatan preventif.
 - c) Pengurangan resiko bencana belum menjadi landasan dasar pembangunan pada hal hampir semua daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara rentan bencana
 - d) Penanggulangan Bencana masih bersifat sektoral dan kondisional, perlu sinkronisasi program dan kegiatan berkait pengurangan resiko bencana.
- b. Dalam aspek Kelembagaan
 - a) Belum ada dan optimalnya aspek-aspek penunjang kelembagaan seperti : PUSDALOPS, TRC, dll
 - b) Fungsi Penanggulangan Bencana yang berpindah dari SATLAK PB kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kemudian ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, kembali lagi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara .

- c. Dalam aspek Ketugasan:
- a) Upaya Penanggulangan Bencana masih disikapi dengan cara yang sama dengan ketugasan lain, tidak ada perkecualian.
 - b) Bencana yang datang tidak terduga, sehingga harus melaksanakan fungsi kesiapsiagaan dan respon time serta tanggap darurat yang mumpuni.
 - c) Paradigma penanganan bencana yang masih cenderung bersifat responsive sehingga menimbulkan dampak yang besar.
 - d) Masih minimnya relawan siaga bencana.
 - e) Rehabilitasi dan rekonstruksi yang sekiranya akan membutuhkan biaya yang cukup besar.
 - f) Belum ada dukungan sumberdaya yang memadai, jumlah anggaran, prosedur, peralatan, sarana dan prasarana, personil.
 - g) Laporan data kebencanaan yang masih belum mutakhir dan terstandar ,sehingga menyulitkan proses tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Tabel. 1.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas
Dan Sasaran Pembangunan Daerah

PERMASALAHAN POKOK (eselon II)	PERMASALAHAN (eselon III)	AKAR MASALAH (eselon IV)
Belum Optimalnya Pelayanan Informasi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana	Belum Optimalnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	a. Belum Optimalnya Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana karena Terbatasnya Saprasi Penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat
		b. Belum Tersedianya Saprasi dan Sumber daya manusia (SDM) PUSDALOPS Penanggulangan Bencana yang memadai
	Belum Optimalnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	c. Belum dilaksanakannya kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan
		a. Belum dilakukan Pelatihan dan sertifikasi Keahlian SDM dan penggunaan peralatan PB
		b. Belum optimalnya Penyelenggaraan Latihan (Geladi) Kesiapsiagaan
		c. Minimnya ketersediaan peralatan dan logistik kebencanaan
		d. Penyimpanan/pergudangan Logistik PB belum tersistem dan terpadu
		e. e.Belum semua Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan Aman Bencana
		f. Belum semua desa menjadi Desa/Kel Tangguh Bencana
		g. Belum Terpenuhi Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir dan tanah longsor

PERMASALAHAN POKOK (eselon II)	PERMASALAHAN (eselon III)	AKAR MASALAH (eselon IV)
	Belum Optimalnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum Optimalnya Pelaksanaan dalam penentuan status Tanggap Darurat b. Belum Optimalnya Penerapan sistem komando operasi darurat c. Masih rendahnya kapasitas petugas Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana secara cepat dan tepat
	Belum Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum tersusunnya Peraturan daerah/perkada tentang Penyebaran Informasi Risiko Bencana b. Belum terbentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana Sehingga Komunikasi Bencana Lintas Lembaga Tidak Optimal c. Belum memiliki Dokumen Rencana Kontijensi sesuai kajian risiko bencana d. Belum terimplementasikannya Tataruang berbasis Pengurangan Risiko Bencana e. e. Belum optimalnya Sinergi Penegakan Hukum untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan f. Belum efektifnya koordinasi Fungsi dan Perlindungan daerah tangkapan dan resapan air untuk peningkatan pencegahan dan mitigasi bencana banjir
Belum Optimalnya Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran serta Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan kondisi membahayakan manusia	Belum Optimalnya Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya sapsras pemadam dan proteksi kebakaran yang terstandar b. Belum optimalnya petugas dalam mendapatkan diklat pemadam kebakaran c. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran d. Belum semua kecamatan tersedia pos pemadam kebakaran dan peralatan yang memadai
	Belum optimalnya penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum tersedianya sarana prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia yang sesuai standar
		<ul style="list-style-type: none"> b. Belum tersedianya Aparatur terlatih dalam pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia yang sesuai standar

1.5 Uraian Singkat Organisasi

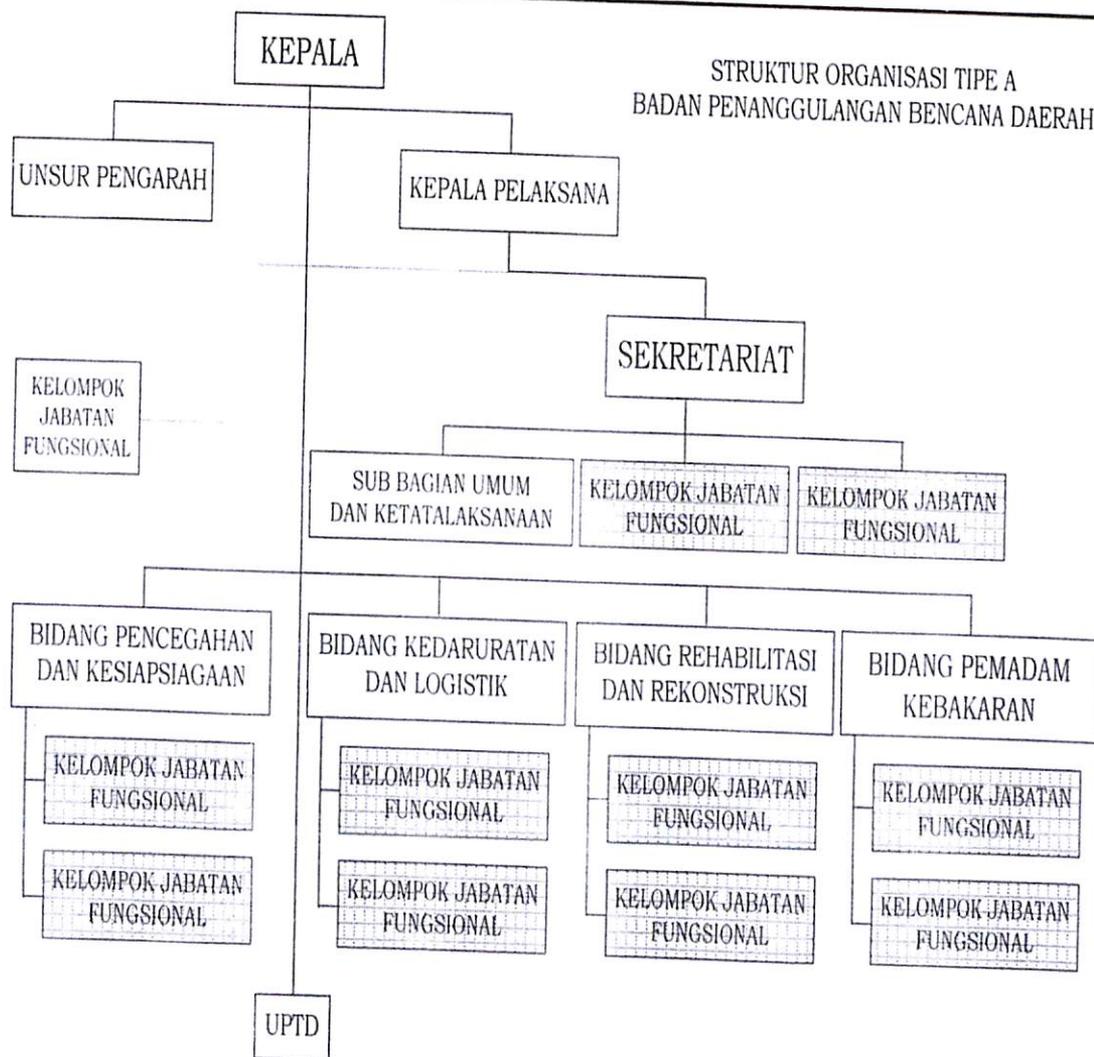
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan Organisasi perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan kebakaran dan bencana di daerah serta berada pada posisi yang sangat strategis karena dapat menentukan tingkat kualitas dalam penanganan kebakaran dan bencana

di daerah yaitu dengan melakukan antisipasi pengurangan resiko sebelum bencana terjadi. Selain itu juga memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan mengevaluasi penanganan bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4, Peraturan Bupati Kutai Kartanegara 42 tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan ;
2. Unsur Pengarah ;
3. Kepala Pelaksana ;
4. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan ;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional ;
5. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional ;
6. Bidang Kedaruratan dan logistik, membawahkan:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional ;
7. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional ;
8. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional ;
9. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 42 TAHUN 2021 TANGGAL 27 SEPTEMBER 2021
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
 PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada unsur pelaksana terdiri dari Pejabat Struktural (Eselon IIB, IIIA, IIIB dan IVA) dan Pejabat Non Struktural (Fungsional Umum dan Teknis), seperti yang ditunjukkan tabel dibawah ini.

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan

No.	Pangkat	Gol.	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pembina Utama	IV/E	-	-	-
2.	Pembina Utama Madya	IV/D	-	-	-
3.	Pembina Utama Muda	IV/C	-	-	-
4.	Pembina Tingkat I	IV/B	2	-	2
5.	Pembina	IV/A	-	2	2
6.	Penata Tingkat I	III/D	12	5	17
7.	Penata	III/C	4	-	4
8.	Penata Muda Tingkat I	III/B	4	1	5
9.	Penata Muda	III/A	10	3	13
10.	Pengatur Tingkat I	II/D	40	10	50
11.	Pengatur	II/C	11	1	12
12.	Pengatur Muda Tingkat I	II/B	6	-	6
13.	Pengatur Muda	II/A	-	-	-
14.	Juru Tingkat I	I/D	2	-	2
15.	Juru	I/C	-	-	-
16.	Juru Muda Tingkat I	I/B	-	-	-
17.	Juru Muda	I/A	-	-	-
	Jumlah		85	22	107

Sumber Data : Kepegawaian BPBD Kab. Kukar 2022

jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebanyak 107 orang Pegawai Negeri Sipil.

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana (S3)	-	-	-
2.	Pasca Sarjana (S2)	2	2	4
3.	Sarjana (S1)	15	3	18
4.	Sarjana Muda	1	-	1
5.	SLTA/SMU	68	14	82
6.	SLTP	2	-	2
7.	Sekolah Dasar	-	-	-
	Jumlah	88	19	107

Sumber Data : Kepegawaian BPBD Kab. Kukar 2022

Tabel 1.4. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Tingkat Esselon	Struktural		Fungsional		Jumlah (orang)
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1.	Esselon II/B	1	-	-	-	1
2.	Esselon III/A	1	-	-	-	1
3.	Esselon III/B	3	-	-	-	3
4.	Esselon IV/A	-	1	46	1	47
Jumlah		5	1	46	1	52

Sumber Data : Kepegawaian BPBD Tahun 2022

Tabel 1.5. Jumlah Tenaga Honor/THL menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana (S3)	-	-	-
2.	Pasca Sarjana (S2)	-	-	-
3.	Sarjana (S1)	37	-	37
4.	Sarjana Muda	3	-	3
5.	SLTA/SMU	142	11	153
6.	SLTP	7	2	9
7.	Sekolah Dasar	1	13	14
Jumlah		190	26	216

Sumber Data : Kepegawaian BPBD Tahun 2022

Tabel 1.6 Jumlah Petugas Operasional telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Pemadam Kebakaran dan Bencana

No.	Nama Diklat	Jumlah (orang)	Ket.
1.	SAR MFR Dan Water Rescue	25	
2.	Jungle Rescue	25	
3.	HART Dan MFR	20	
4.	Scuba Diving And Sea Survival	20	
5.	Water Rescue Lanjutan	20	
6.	Personil DAMKAR Tingkat Dasar	33	
7.	Personil DAMKAR Tingkat Lanjutan	12	
8.	Basic Water Rescue	25	
Jumlah		180	

Sumber Data : Kepegawaian BPBD Kab. Kukar 2022

c. Sarana dan prasarana

Prasarana dan sarana penunjang yang dimiliki sesuai Tabel berikut :

Tabel 1.7. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Gedung Kantor Badan	2 Buah	Baik
2	Pos Penanggulangan Bencana di Kecamatan	6 Buah	Baik
Jumlah		8 Buah	

Sumber Data : Subbag Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tabel 1.8. Sarana dan Prasarana Kendaraan Roda Empat dan Roda Enam

No	Sarana Dan Prasarana	Jumlah	Ket.
1.	Mercedes Benz/1525 AF /4X4 (Ziegler Damkar)	3 Buah	Baik
2.	Hino WU342R- HKMRJD3 (Damkar)	3 Buah	Baik
3.	Toyota Dyna Long XZU342R-TKMQSD3 4.00 (Damkar)	2 Buah	Baik
4.	Toyota Dyna Long 4.600 X2U342R-TKMQSD (Damkar)	2 Buah	Baik
5.	Isuzu NKR 66 (Damkar)	2 Buah	Baik
6.	Ford Ranger 4X4 2900 cc Diesel MT	2 Buah	Baik
7.	Toyota KF 60 Kijang STD Pick UP (Damkar)	1 Buah	Baik
8.	Isuzu NKR 66 4334 (Damkar)	1 Buah	Baik
9.	Mercedes Benz 700 (Damkar)	1 Buah	Baik
10.	Toyota / Innova E Standar	1 Buah	Baik
11.	NISSAN	1 Buah	Baik
12.	Ford Rangger	1 Buah	Baik
13.	Ford	1 Buah	Baik
14.	Toyota	1 Buah	Baik
15.	Isuzu	1 Buah	Baik

Sumber Data : Subbag Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tabel 1.9. Sarana dan Prasarana berupa Aset/Tanah/Peralatan/Perlengkapan

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Ket.
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	Baik	
2.	Tanah bangunan Pos Jaga/Menara jaga	2	Baik	
3.	Mobil Roda 4	19	Baik	
		3	Kurang Baik	
4.	Roda 2	12	Baik	
5.	Mesin Compresor	1	Baik	
6.	Dongkrak Mekanik	1	Baik	
7.	Perkakas Bengkel Kerja Lain-Lain	1	Baik	
8.	Lemari Penyimpanan	1	Baik	
9.	Mesin Ketik Standar	3	Baik	
10.	Mesin Hitung	1	Rusak Berat	
11.	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	1	Kurang Baik	
12.	Lemari Besi	6	Baik	
13.	Rak Besi/Metal	1	Baik	
14.	Filling Kayu	5	Baik	
15.	Brankas	1	Baik	
16.	Lemari Kayu	1	Baik	
17.	Alat Penghancur Kertas	2	Baik	
18.	White Board	1	Kurang Baik	
19.	Alat Kantor Lainnya	3	Baik	
20.	Lemari Kayu	1	Baik	
21.	Meja Kayu/Rotan	1	Kurang Baik	
22.	Tempat Tidur Besi	2	Baik	
23.	Meja Rapat	5	Baik	
24.	Kursi Rapat	101	Baik	
25.	Kasur	1	Baik	
26.	Kasur	14	Rusak Berat	
27.	Tenda	2	Baik	
28.	Sofa	2	Baik	

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Ket.
29.	Jam Elektronik	5	Baik	
30.	Lemari Es	4	Baik	
31.	AC	19	Baik	
32.	AC	1	Kurang Baik	
33.	Kompor Gas	1	Baik	
34.	Tabung Gas	1	Baik	
35.	Alat Dapur lainnya	1	Rusak Berat	
36.	Alat Dapur Lainnya	1	Baik	
37.	Kamera Film	3	Baik	
38.	Alat Hiasan	1	Baik	
39.	Dispenser	1	Baik	
40.	Handycam	1	Rusak Berat	
41.	Handycam	1	Baik	
42.	Alat Pemadam Portable	3	Baik	
43.	Pompa Kebakaran	2	Baik	
44.	Pipa Pemancar	16	Baik	
45.	Baju Anti Panas	4	Baik	
46.	Masker Gas	60	Baik	
47.	Alat Pembantu Kebakaran	156	Baik	
48.	PC / Komputer	6	Baik	
49.	Notebook	10	Baik	
50.	Peralatan Komputer Lainnya	1	Baik	
51.	Printer	8	Baik	
52.	Monitor	5	Baik	
53.	Peralatan Personal Komputer	2	Baik	
54.	Meja Kerja Pejabat Esselon III	1	Baik	
55.	Meja Kerja Pejabat Esselon IV	5	Baik	
56.	Kursi Kerja Pejabat Esselon III	1	Baik	
57.	Kursi Kerja Pejabat Esselon IV	5	Baik	
58.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	Baik	
59.	Proyektor	1	Baik	
60.	UPS	1	Baik	
61.	Handy Talky	1	Baik	
62.	Faxmili	1	Baik	
63.	Alat Komunikasi Lainnya	1	Baik	
64.	Alat Komunikasi Lainnya	1	Rusak Berat	
65.	Alat Komunikasi Radio SSB	1	Baik	
66.	Alat Komunikasi Radio HF/FM	1	Baik	
67.	Alat Pemadam Kebakaran	1	Baik	
68.	Gedung Kantor Semi Permanen	1	Baik	
69.	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	2	Baik	
70.	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	1	Baik	
71.	Bangunan Hidran Umum	1	Baik	
72.	BCD	6	Baik	
73.	Tabung Scuba	6	Baik	
74.	Baju Scuba	5	Baik	
75.	Regulator	6	Baik	
76.	Sepatu Scuba	5	Baik	
77.	Vines	6	Baik	
78.	Pisau	6	Baik	

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Ket.
79.	Masker	6	Baik	
80.	Senter	6	Baik	
81.	Snorkel	6	Baik	
82.	Slayer	6	Baik	
83.	Sarung Tangan	6	Baik	
84.	Belt	6	Baik	
85.	Weight 4 Kg	5	Baik	
86.	Weight 2 Kg	10	Baik	
87.	Selang Compressor	3	Baik	

Sumber Data : Subbag Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

1.9. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 berasal dari APBD Pemerintah Daerah, Pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.015.605.985. pada saat Anggaran Perubahan bertambah menjadi Rp. 32.491.744.270,- bertambah Rp. 5.4761.382.285,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program pendukung dengan rincian 3 (tiga) program dan 14 (empat belas) kegiatan serta 51 (lima puluh satu) Sub kegiatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021. Dalam Renstra dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi, masalah, penentu keberhasilan dan indikasi program kegiatan yang akan dijalankan selama tiga tahun kedepan dan dijalankan dalam rencana kerja tahunan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 5 tahun kedepan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah untuk menetapkan prioritas program kegiatan pembangunan yang strategis lima tahunan melalui sumber pembiayaan APBD yang dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran sebagai tolak ukur pertanggung jawaban Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada setiap akhir Tahun Anggaran.

Adapun potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul dalam pencapaian selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang akan datang, dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1. Potensi, Peluang dan Kendala yang ada

Potensi	Peluang	Kendala Yang Ada
Sesuai dengan Undang – Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, bahwa urusan Ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar sehingga lebih fokus dalam rangka mewujudkan kinerja yang optimal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sinkronisasi dan koorBadani yang lebih optimal dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta pendanaanya. (pemerintah pusat, daerah, kecamatan dan Desa/kelurahan). 2. Perkembangan teknologi informasi sudah sangat dibutuhkan untuk mempercepat komunikasi, informasi dan monitoring mulai dari proses pra bencana, saat bencana sampai pasca bencana. 3. Partisipasi aktif dari organisasi politik, masyarakat, dunia usaha, LSM dan pelajar dan Mahasiswa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana serta pemahaman terhadap kesiapsiagaan ; 2. Luasnya wilayah, Topografi, Geografis dan Demografi dari Kabupaten Kutai Kartanegara. 3. Terbatasnya kuantitas dan kualitas aparat penanggulangan bencana. 4. Globalisasi dan kemajuan tehnologi informasi belum secara keseluruhan diterapkan

		<p>dalam penanggulangan bencana;</p> <p>5. Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam pembangunan secara efektif dan komprehensif.</p>
--	--	--

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi dan misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Kutai Kartanegara yang dituangkan dalam RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan /atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Visi yang hendak dicapai oleh Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2022-2026 dalam masa kepemimpinannya Adalah "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera Dan Berbahagia".

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Misi ke- 5 yaitu Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan. Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	Indeks Risiko Bencana

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu: Meningkatkan ketahanan bencana daerah dengan Indeks Risiko Bencana .

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 2022- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana, yaitu ;

Pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana.

Salah satu layanan yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana yaitu untuk lebih memahami berbagai ancaman bencana yang ada di wilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman (hazards) dan kerentanan (vulnerability) yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan (capacity) dalam menghadapi ancaman/dampak bencana.

2. Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, yaitu :

Serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah pelaksanaan gladi kesiapsiagaan bencana bagi warga negara dalam bentuk simulasi dan gladi lapang sesuai dengan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontinjensi yang telah disusun.

3. Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, yaitu; Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana.
4. Optimalisasi Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana ;
5. Peningkatan Kualitas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran yaitu : Serangkaian kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran untuk menangani dan menyelamatkan korban kebakaran.
6. Peningkatan Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, yaitu : Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian kebakaran untuk menangani dan menyelamatkan korban kebakaran.

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Meningkatkan Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan
2	Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan Saprass PUSDALOPS Penanggulangan Bencana yang memadai 2. Melaksanakan kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan 3. Meningkatkan Kuantitas Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB 4. Menyelenggarakan Latihan (Geladi) Kesiapsiagaan 5. Meningkatkan ketersediaan peralatan dan logistik kebencanaan 6. Menerapkan sistem Penyimpanan yang terpadu pada pergudangan Logistik PB 7. Mensosialisasikan Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan Aman Bencana 8. Meningkatkan jumlah Desa/Kel Tangguh Bencana 9. Menyediakan sarana dan prasarana sistem Peringatan Dini (EWS) Bencana Banjir dan tanah longsor 10. Menyusun Dokumen Rencana Kontijensi sesuai kajian risiko bencana 11. Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan
3	Peningkatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan Pelaksanaan dalam tahapan penentuan status Tanggap Darurat 2. Mengoptimalkan Penerapan system komando operasi darurat 3. Meningkatkan kapasitas Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana secara cepat dan tepat
4	Optimalisasi Sistem Penataan Dasar Penanggulangan Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Peraturan Daerah tentang Penyebaran Informasi Risiko Bencana 2. Membentuk dan mengoptimalkan peran Forum Pengurangan Risiko Bencana 3. Mengintegrasikan rencana Tata Ruang berbasis Pengurangan Risiko Bencana 4. Mengoptimalkan sinergi Penegakan Hukum untuk Peningkatan Efektivitas 5. Meningkatkan koordinasi Fungsi dan Perlindungan daerah tangkapan dan resapan air untuk peningkatan pencegahan dan mitigasi bencana banjir
5	Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan saprass pemadam dan proteksi kebakaran yang terstandar 2. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan petugas pemadam kebakaran 3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian Kebakaran 4. Meningkatkan jumlah pos pemadam kebakaran dan peralatan yang memadai di kecamatan

6	Peningkatan Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi sarana prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia yang sesuai standar 2. Melatih Aparatur dalam pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia yang sesuai Standar
---	--	---

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2022, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.4
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program Penanggulangan Bencana
Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencana di daerah	Program Penanggulangan Bencana
Meningkatnya kualitas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	Persentase Pemenuhan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Program Pencegahan, Penanggulangan, Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
	Persentase Layanan Pemadaman, penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
	Jumlah pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran)	Program Pencegahan, Penanggulangan, Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
Meningkatnya penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Persentase penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Program Pencegahan, Penanggulangan, Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan,

Tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai	B	Hasil Evaluasi APIP (Inspektorat Daerah Kab.Kukar)
Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	Persen	8,1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi Jumlah seluruh warga negara dikawasan rawan bencana dikali 100
Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	10,6	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi Jumlah seluruh warga negara dikawasan rawan bencana dikali 100
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi Jumlah seluruh warga negara korban bencana dikali 100
Optimalnya Penataan	Jumlah Dokumen	Dokumen	2	Jumlah Dokumen

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencan di daerah	Dokumen	2	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah
Meningkatnya kualitas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	Persentase Pemenuhan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	12,2	Jumlah layanan pemadaman penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kab dalam tingkat waktu tanggap oleh BPBD ditambah jumlah layanan pemadaman dalam waktu tanggap oleh Relawan yang dibentuk dan atau dibawah Binaan BPBD dibagi Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten di kali 100 %
	Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	Jumlah layanan pemadaman penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di bagi Jumlah kejadian di Kabupaten di kali 100 %
	Jumlah pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran)	Kelompok	10	Jumlah Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran) yang terbentuk di bagi Jumlah target pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran) setiap tahunnya dikali 100 %
Meningkatnya penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Persentase penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Persen	100	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia di bagi Perkiraan Jumlah keseluruhan korban dikali 100 %

Tabel 2.6
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Dengan Data Awal Tahun 2021 dan Target Tahun 2022

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2021)	Target 2022	Target Akhir Renstra 2022
1	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai	75	75	75
2	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	Persen	5,11	8,11	8,11
3	Persentase Layanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	8,1	10,6	10,6
4	Persentase Layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100
5	Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencan di daerah	Dokumen	-	2	2
6	Persentase Pemenuhan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	10,86	12,2	12,2
7	Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	100	100
8	Jumlah pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran)	Kelompok	74	10	10
9	Persentase penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Persen	100	100	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

1.1 Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Rata-rata realisasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 sebesar 91% ≤ 100%. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja SANGAT TINGGI. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai	75			
Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	Persen	8,11	1,13	13,92 %	Rendah
Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	10,6	8,97	85 %	Sangat Tinggi
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100 %	Sangat Tinggi
Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencana di daerah	Dokumen	2	9	450 %	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	Persentase Pemenuhan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	12,2	9,66	79,13 %	Sangat Tinggi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
	Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	100	100 %	Sangat Tinggi
	Jumlah pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran)	Kelompok	1	2	20 %	Rendah
Meningkatnya penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	100	100 %	Sangat Tinggi
Rata-rata					Persen	108
					Persen	100

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja ke-1

Target kinerja "Indikator Kinerja ke-1" tahun 2022 sebesar 75 dan realisasinya atau capaian kinerja sebesar % (Hasil Evaluasi APIP Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara), Target kinerja

2. Indikator Kinerja ke-2

Target kinerja "Indikator Kinerja ke-2" tahun 2022 sebesar 8,11 dan realisasinya 1,13 atau capaian kinerja sebesar 13,92 % (Lppd.kukarkab.go.id), Target kinerja tidak tercapai.

a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- 1) Belum Optimalnya Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana karena Terbatasnya Saprass Penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat .
- 2) Belum Tersedianya Saprass dan Sumber daya manusia (SDM) PUSDALOPS Penanggulangan Bencana yang memadai .
- 3) Belum dilaksanakannya kajian kebutuhan peralatan dan Logistik kebencanaan.

b. Solusi/rekomendasinya adalah :

- 1) Meningkatkan Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana karena Terbatasnya Saprasi Penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat.
- 2) Mensosialisasikan Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan Aman Bencana .
- 3) Menyusun Standarisasi Penyebaran Informasi Bencana.

3. Indikator Kinerja ke-3

Target kinerja "Indikator Kinerja ke-3" tahun 2022 sebesar 10,55 dan realisasinya 8,97 atau capaian kinerja sebesar 85 % (Lppd.kukarkab.go.id), Target kinerja tidak tercapai.

a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- 1) Belum dilakukan Pelatihan dan sertifikasi Keahlian SDM dan penggunaan peralatan PB .
- 2) Belum optimalnya Penyelenggaraan Latihan (Gladi) Kesiapsiagaan
- 3) Minimnya ketersediaan peralatan dan logistik kebencanaan
- 4) Belum semua Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan Aman Bencana
- 5) Belum semua desa menjadi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
- 6) Belum Terpenuhi Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir dan tanah longsor
- 7) Belum Adanya Rencana Kontijensi Yang Dapat Dijadikan Rencana Operasi Penanggulangan Bencana;

b. Solusi/rekomendasinya adalah :

- 1) Meningkatkan Kuantitas Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB
- 2) Penyelenggarakan Latihan (Geladi) Kesiapsiagaan
- 3) Menyediakan Saprasi PUSDALOPS Penanggulangan Bencana yang memadai
- 4) Melaksanakan kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan
- 5) Menyediakan sarana prasarana sistem Peringatan Dini (EWS) Bencana
- 6) Meningkatkan jumlah Desa/Kel Tangguh Bencana
- 7) Membentuk dan mengoptimalkan peran Forum Pengurangan Risiko Bencana
- 8) Menyusun Dokumen Rencana Kontijensi sesuai kajian risiko bencana

4. Indikator Kinerja ke-4

Target kinerja "Indikator Kinerja ke-4" tahun 2022 sebesar 100 dan realisasinya 100 atau capaian kinerja sebesar 100 % (Lppd.kukarkab.go.id), Target kinerja tercapai.

a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan dalam penentuan status tanggap darurat ;
- 2) Belum optimalnya penerapan sistem komando operasi darurat ;
- 3) Masih rendahnya kapasitas petugas tim kaji cepat ke lokasi bencana secara cepat dan tepat ;
- 4) Belum adanya rencana kontijensi yang dapat dijadikan rencana operasi penanggulangan bencana;
- 5) Sarana prasarana penanggulangan bencana yang belum mencukupi mengingat luasnya wilayah;

- 6) Terhambatnya peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia yang disebabkan oleh sebagian besar personil pencarian, pertolongan, dan evakuasi berstatus sebagai tenaga tgl sehingga kesulitan untuk mengikuti pendidikan dan latihan;
 - 7) Keterbatasan anggaran untuk peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia;
 - 8) Luasnya wilayah dan masih ada wilayah yang mengalami blank spot sehingga arus informasi ketika terjadinya bencana tidak diterima dengan cepat; dan
 - 9) Masih kurangnya partisipasi serta kesadaran baik dari tingkat rt, desa/kelurahan, bahkan kecamatan memberikan laporan kejadian bencana.
- b. Solusi/rekomendasinya adalah :
- 1) Mengoptimalkan Pelaksanaan dalam tahapan penentuan status Tanggap Darurat ;
 - 2) Mengoptimalkan Penerapan sistem komando operasi darurat ;
 - 3) Meningkatkan kapasitas Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana secara cepat dan tepat ;
 - 4) Meningkatkan ketersediaan peralatan dan logistik kebencanaan ; dan
 - 5) Menerapkan sistem Penyimpanan yang terpadu pada pergudangan Logistik PB.

5. Indikator Kinerja ke- 5

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-5” tahun 2022 sebesar 2 dan realisasinya 9 atau capaian kinerja sebesar 450 % (draft Raperbup yang diusulkan ke Bagian Hukum), Target kinerja melebihi target .

6. Indikator Kinerja ke- 6

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-6” tahun 2022 sebesar 12,21 dan realisasinya 9,66 atau capaian kinerja sebesar 79,13 % (Lppd.kukarkab.go.id), Target kinerja belum tercapai.

- a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :
- 1) Masih terdapat 8 kecamatan yang belum memiliki Pos Pemadam Kebakaran dan pos yang ada di kecamatan kondisinya mulai banyak terlihat kerusakan pada bangunannya, termasuk sarana komputerisasi administrasi, ruang tunggu dan ruang informasi sehingga menghambat pelayanan kepada masyarakat;
 - 2) Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas 27.630 Km², dan terdiri dari 20 Kecamatan tetapi hanya memiliki 1 unit mobil rescue yang terletak di Tenggarong sehingga pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang jika terjadi di kecamatan tidak bisa ditangani secara maksimal seperti penyelamatan Kecelakaan transportasi, animal rescue, penyelamatan pada ketinggian, Penyelamatan bangunan runtuh, penanganan pohon tumbang, penanganan percobaan bunuh diri dan lain-lain ;

- 3) Masih kurangnya petugas pemadam kebakaran di kecamatan serta masih kurangnya kualifikasi petugas pemadam kebakaran ;
 - 4) Masih rendahnya gaji petugas pemadam kebakaran dan belum adanya honorarium piket jaga, honorarium per kejadian kebakaran dan honorarium per kegiatan penyelamatan bagi petugas pemadam kebakaran mengingat petugas pemadam kebakaran memiliki beban kerja resiko tinggi ;
 - 5) Masih kurangnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang dimiliki oleh sub urusan kebakaran.
 - 6) Masih kurangnya relawan pemadam kebakaran yang ada di kecamatan, kelurahan dan desa serta peralatannya ;
 - 7) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pencegahan, pengendalian dan pemadaman kebakaran;dan
 - 8) Pemadam Kebakaran Belum memiliki Sumber Air/Reservoir secara mandiri.
- b. Solusi/rekomendasinya adalah :
- 1) Penambahan Pos Pemadam Kebakaran bagi kecamatan yang belum memiliki pos pemadam kebakaran ;
 - 2) Perlunya penambahan unit mobil rescue untuk penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
 - 3) Perlunya penambahan jumlah petugas pemadam kebakaran di kecamatan dan mengadakan diklat bagi petugas pemadam kebakaran ;
 - 4) Perlu diberikan pendapatan yang memadai dan tunjangan resiko tinggi bagi petugas pemadam kebakaran;
 - 5) Perlunya penambahan anggaran untuk membeli sarana & prasarana;
 - 6) Perlu dibentuk kelompok relawan pemadam kebakaran di kecamatan, kelurahan dan desa serta bantuan peralatannya;
 - 7) Perlu diperbanyak edukasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran;
 - 8) Perlu dibangun sumber air/reservoir mandiri untuk pengisian mobil pemadam kebakaran sehingga tidak akan terganggu terutama pada musim kemarau

7. Indikator Kinerja ke- 7

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-7” tahun 2022 sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100 % (Lppd.kukarkab.go.id), Target kinerja tercapai.

8. Indikator Kinerja ke- 8

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-8” tahun 2022 sebesar 10 Kelompok dan realisasinya 2 Kelompok atau capaian kinerja sebesar 20 % (Desk Pengendalian pencapaian kinerja) , Target kinerja belum tercapai.

a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- 1) Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas 27.630 Km², dan terdiri dari 20 Kecamatan tetapi hanya memiliki 1 unit mobil rescue yang terletak di

Tenggarong sehingga pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang jika terjadi di kecamatan tidak bisa ditangani secara maksimal seperti penyelamatan Kecelakaan transportasi, animal rescue, penyelamatan pada ketinggian, Penyelamatan bangunan runtuh, penanganan pohon tumbang, penanganan percobaan bunuh diri dan lain-lain ;

- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan, pengendalian dan pemadaman kebakaran; dan
- 3) Tata Kelola kegiatan yang belum baik.

b. Solusi/rekomendasinya adalah :

- 1) Pendidikan dan Latihan bagi pengelola kegiatan;
- 2) Peningkatan pembentukan kelompok relawan pemadam kebakaran di kecamatan, kelurahan dan desa serta bantuan peralatannya;
- 3) Perlu diperbanyak edukasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran;

9. Indikator Kinerja ke- 9

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-9” tahun 2022 sebesar 100 % dan realisasinya 100 % atau capaian kinerja sebesar 100% (Desk Pengendalian pencapaian kinerja), Target kinerja tercapai.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 100 %. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2021) sebesar 55,44 %. Terjadi peningkatan kinerja sebesar 45 %. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai	75	69,16	92%	75			
Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	Persen	5,11	0	0%	8,11	1,13	13 %	Meningkat
Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan	Persentase Layanan pencegahan dan	Persen	8,1	2	4 %	10,55	8,97	85 %	Meningkat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Person	100	100	100%	100	100	100%	Tetap
Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencana di daerah	Dokumen	-	0	0	2	9	450%	Meningkat
Meningkatnya kualitas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	Persentase Pemenuhan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Person	10,86	10,86	100%	12,2	9,66	79%	Menurun
	Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Person	100	100	100%	100	100	100%	Tetap
	Jumlah pembentuk Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran)	Kelompok	74	2	3%	10	2	20%	Meningkat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Meningkatnya penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	100	100	100%	100	100	100%	Tetap

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2022)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2022	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2022
Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	75		
Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	8,11%	1,13%	13 %
Persentase Layanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	10,55%	8,97%	85 %
Persentase Layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100	100%
Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencana di daerah	2 Dokumen	9 Dokumen	450%
Persentase Pemenuhan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WМК)	12,2 %	9,66%	79%
Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban	100%	100%	100%

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2022)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2022	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2022
Kebakaran			
Jumlah pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran)	10 Kelompok	2 Kelompok	20%
Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%	100%

3.1.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Program	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	(6) = (3-5)	7
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten			
Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	13%	Program Penanggulangan Bencana	71%	-58%	Terbatasnya kemampuan petugas dan Tata kelola kegiatan belum baik
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	85%	Program Penanggulangan Bencana	71%	14%	Efektifitas penggunaan belanja perjalanan dinas dan honorarium panitia
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Program Penanggulangan Bencana	71%	29%	Efektifitas penggunaan belanja perjalanan dinas dan honorarium

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Program	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	(6) = (3-5)	7
						panitia serta rendahnya intensitas bencana
Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi penanggulangan Bencana di daerah	450%	Program Penanggulangan Bencana	71%	379%	Perda Nomor 10 Tahun 2017 dan Tata Kelola kegiatan yang baik
Meningkatnya kualitas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	Persentase Pemenuhan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	79%	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	90%	-11%	Terbatasnya kemampuan petugas, jarak, sarpras Damkar, dan Tata kelola kegiatan belum baik
	Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	90%	10%	Efektifitas penggunaan belanja perjalanan dinas dan honorarium panitia
	Jumlah pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran)	20%	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	90%	-70%	Terbatasnya kemampuan petugas dan Tata kelola kegiatan belum baik
Meningkatnya penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	90%	10%	Efektifitas penggunaan belanja perjalanan dinas dan honorarium panitia

3.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja Program tahun 2022 yaitu Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan target sebesar 75 dan realisasinya.....atau capaian kinerja sebesar%. Target kinerja tidak tercapai/tercapai/melebihi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu.....solusi/rekomendasinya adalah.....

2) Program Penanggulangan Bencana

Indikator kinerja Program tahun 2022 , yaitu :

1) Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana dengan target sebesar 8,11 dan realisasinya. 1,13 .atau capaian kinerja sebesar 13,92.%. Target kinerja tidak tercapai.

a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- 1) Terbatasnya kemampuan petugas pengelola kegiatan.
- 2) Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) belum optimal digunakan dalam pelaksanaan kegiatan.
- 3) Tata kelola kegiatan yang belum baik

b. Solusi/rekomendasinya adalah :

- 1) Peningkatan kapasitas petugas pengelola kegiatan.
- 2) Mengoptimalkan Dokumen Kajian Risiko Bencana dalam pelaksanaan kegiatan.
- 3) Melakukan pendataan kebutuhan standar pelayanan informasi rawan bencana.
- 4) Menyusun Standarisasi Penyebaran Informasi Bencana.
- 5) Meningkatkan pengadaan dan pemasangan papan rambu informasi, peringatan dan larangan bencana yang berstandarisasi
- 6) Memperbaiki tata kelola kegiatan.

2) Persentase Layanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dengan target kinerja sebesar 10,55 dan realisasinya 8,97 atau capaian kinerja sebesar 85 % , Target kinerja tidak tercapai.

a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- 1) Terbatasnya kemampuan petugas pengelola kegiatan.
- 2) Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) belum optimal digunakan dalam pelaksanaan kegiatan.
- 3) Tata kelola kegiatan belum baik.

- b. Solusi/rekomendasinya adalah :
 - 1) Peningkatan kapasitas petugas pengelola kegiatan.
 - 2) Mengoptimalkan Dokumen Kajian Risiko Bencana dalam pelaksanaan kegiatan.
 - 3) Melakukan pendataan kebutuhan standar pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan.
 - 4) Memperbaiki tata kelola kegiatan.
- 3) Persentase Layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan target kinerja sebesar 100 dan realisasinya 100 atau capaian kinerja sebesar 100 % target kinerja tercapai.
 - a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :
 - 1) Belum optimalnya pelaksanaan dalam penentuan status tanggap darurat ;
 - 2) Belum optimalnya penerapan sistem komando operasi darurat ;
 - 3) Masih rendahnya kapasitas petugas tim kaji cepat ;
 - 4) Sarana prasarana penanggulangan bencana yang belum mencukupi mengingat luasnya wilayah;
 - 5) Terbatasnya kapasitas petugas pencarian dan penyelamatan;dan
 - 6) Masih kurangnya partisipasi serta kesadaran baik dari tingkat RT, desa/kelurahan, bahkan kecamatan memberikan laporan kejadian bencana.
 - b. Solusi/rekomendasinya adalah :
 - 1) Peningkatan kapasitas petugas ;
 - 2) Mengoptimalkan Pelaksanaan dalam tahapan penentuan status Tanggap Darurat ;
 - 3) Mengoptimalkan Penerapan sistem komando operasi darurat ;
 - 4) Optimalisasi Tim Kaji Cepat;
 - 5) Meningkatkan ketersediaan peralatan dan logistik kebencanaan ; dan
 - 6) Menerapkan sistem Penyimpanan yang terpadu pada pergudangan Logistik PB.
- 4) Jumlah Dokumen Regulasi penanggulangan Bencana di daerah dengan target kinerja sejumlah 2 dan realisasinya 9 atau capaian kinerja sebesar 450 %, melebihi target .
- 3) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - 1) Persentase Pemenuhan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dengan target kinerja sebesar 12,2 dan realisasinya 9,66 atau capaian kinerja sebesar 79 % target kinerja belum tercapai.

- a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :
- 1) Masih terdapat 8 kecamatan yang belum memiliki Pos Pemadam Kebakaran dan pos yang ada di kecamatan kondisinya mulai banyak terlihat kerusakan pada bangunannya, termasuk sarana komputerisasi administrasi, ruang tunggu dan ruang informasi sehingga menghambat pelayanan kepada masyarakat;
 - 2) Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas 27.630 Km², dan terdiri dari 20 Kecamatan tetapi hanya memiliki 1 unit mobil rescue yang terletak di Tenggarong sehingga pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang jika terjadi di kecamatan tidak bisa ditangani secara maksimal seperti penyelamatan Kecelakaan transportasi, animal rescue, penyelamatan pada ketinggian, Penyelamatan bangunan runtuh, penanganan pohon tumbang, penanganan percobaan bunuh diri dan lain-lain ;
 - 3) Masih kurangnya petugas pemadam kebakaran di kecamatan serta masih kurangnya kualifikasi petugas pemadam kebakaran ;
 - 4) Masih rendahnya gaji petugas pemadam kebakaran dan belum adanya honorarium piket jaga, honorarium per kejadian kebakaran dan honorarium per kegiatan penyelamatan bagi petugas pemadam kebakaran mengingat petugas pemadam kebakaran memiliki beban kerja resiko tinggi ;
 - 5) Masih kurangnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang dimiliki oleh sub urusan kebakaran.
 - 6) Masih kurangnya aparaturnya pemadam kebakaran yang ada di kecamatan, kelurahan dan desa serta peralatannya ;
 - 7) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pencegahan, pengendalian dan pemadaman kebakaran; dan
 - 8) Pemadam Kebakaran Belum memiliki Sumber Air/Reservoir secara mandiri.
- b. Solusi/rekomendasinya adalah :
- 1) Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran .
 - 2) Upaya penambahan pos pemadam dan sarana kelengkapannya berstandarisasi di setiap kecamatan atau Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) ;
 - 3) Upaya penambahan unit mobil rescue untuk penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
 - 4) Peningkatan jumlah dan kapasitas petugas pemadam kebakaran di kecamatan ;

- 5) Perlu diberikan pendapatan yang memadai dan tunjangan resiko tinggi bagi petugas pemadam kebakaran;
 - 6) Perlu dibangun sumber air/reservoir mandiri untuk pengisian mobil pemadam kebakaran sehingga tidak akan terganggu terutama pada musim kemarau ; dan
 - 7) Memperbaiki Tata Kelola kegiatan.
2. Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100 % , Target kinerja tercapai.
 3. Jumlah pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran dengan target kinerja sebesar 10 Kelompok dan realisasinya 2 Kelompok atau capaian kinerja sebesar 20, target kinerja belum tercapai.
 - a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :
 - 1) Tata kelola kegiatan yang belum baik, sehingga timbul ketidaksiannya dalam dokumen perencanaan antara RPJMD, Renstra Perangkat daerah dan Target yang tercantum dalam DPA Sub Kegiatan Tahun 2022.
 - b. Solusi/rekomendasinya adalah :
 - 1) Pendidikan dan Latihan bagi pengelola kegiatan;
 - 2) Meningkatkan jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya ;
 - 3) Membentuk dan membina Desa/Kelurahan dengan Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya; dan
 - 4) Menyusun Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang telah tersedia dukungan Saprasi Damkar.
 - 5) Memperbaiki tata kelola kegiatan.
 4. Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dengan target sebesar 100 % dan realisasinya 100 % atau capaian kinerja sebesar 100%, Target kinerja tercapai.

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	75			
Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	Penanggulangan Bencana	8,11%	1,13%	13 %	Terbatasnya kemampuan petugas dan Tata kelola kegiatan belum baik
Meningkatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penanggulangan Bencana	10,55%	8,97%	85 %	Terbatasnya kemampuan petugas dan Tata kelola kegiatan belum baik
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	Kesiapsiagaan petugas dan informasi yang akurat
Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi penanggulangan Bencana di daerah	Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	9 Dokumen	450%	Perda Nomor 10 Tahun 2017 dan Tata Kelola kegiatan yang baik
Meningkatnya kualitas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	Persentase Pemenuhan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WМК)	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	12,2 %	9,66 %	79%	Terbatasnya kemampuan petugas , jarak, sarpras Damkar , dan Tata kelola kegiatan belum baik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
	Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 %	100 %	100%	Kesiapsiagaan petugas dan informasi yang akurat
	Jumlah pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran)	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	10 Kelompok	2 Kelompok	20%	Terbatasnya kemampuan petugas dan Tata kelola kegiatan belum baik
Meningkatnya penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 %	100 %	100%	Kesiapsiagaan petugas dan informasi yang akurat

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2022 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 91,34 %, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 7
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.464.350.232	22.321.360.690	95%	1.142.989.542
Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	Penanggulangan Bencana	700.546.000	555.529.781	79%	145.016.219
Meningkatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penanggulangan Bencana	1.134.294.000	958.950.382	85%	175.343.618
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Penanggulangan Bencana	1.550.000.000	1.286.078.750	83%	263.921.250
Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi penanggulangan Bencana di daerah	Penanggulangan Bencana	1.857.514.400	1.237.906.323	67%	619.608.077
Meningkatnya kualitas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	Persentase Pemenuhan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WМК)	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	825.000.000	713.444.440	86%	111.555.560

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
	Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.215.039.638	1.128.918.167	93%	86.121.471
	Jumlah pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran)	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.545.000.000	1.283.427.370	83%	261.572.630
Meningkatnya penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	200.000.000	191.310.028	96%	8.689.972
Total			32.491.744.270	29.676.925.931	91,34%	2.814.818.339

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2021) realisasi anggaran sebesar 90,74 %, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 8
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun Sebelumnya (2021)

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.587.212.616	18.685.688.040	95%	901.524.576
Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	Penanggulangan Bencana	-	-	-	-
Meningkatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penanggulangan Bencana	582.178.840	579.305.776	100%	2.873.064
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Penanggulangan Bencana	1.001.034.000	928.346.554	93%	72.687.446
Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi penanggulangan Bencana di daerah	Penanggulangan Bencana	191.246.000	134.504.000	70%	56.742.000
Meningkatnya kualitas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	Persentase Pemenuhan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	400.000.000	42.364.000	11%	357.636.000
	Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.672.708.138	1.354.297.728	81%	318.410.410
	Jumlah pembentukan Balakarcana (Barisan	Pencegahan, Penanggulangan,	2.011.775.000	1.386.420.640	69%	625.354.360

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
	Sukarela Pemadam Kebakaran)	Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran				
Meningkatnya penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	-	-	-	-
Total			25.446.154.594	23.110.926.738	90,74%	2.335.227.856

Dengan demikian, pada tahun 2022 terjadi peningkatan realisasi anggaran sebesar 0,6 %.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 rata-rata sebesar 100 % (Sangat Tinggi), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan target sebesar 75 dan realisasinya.....atau capaian kinerja sebesar%. Target kinerja tidak tercapai/tercapai/melebihi target.
- 2) Capaian kinerja Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana dengan target sebesar 8,11 dan realisasinya. 1,13 .atau capaian kinerja sebesar 13,92.%. Target kinerja tidak tercapai.
- 3) Capaian kinerja Persentase Layanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dengan target kinerja sebesar 10,55 dan realisasinya 8,97 atau capaian kinerja sebesar 85 % , Target kinerja tidak tercapai.
- 4) Capaian kinerja Persentase Layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan target kinerja sebesar 100 dan realisasinya 100 atau capaian kinerja sebesar 100 % target kinerja tercapai.
- 5) Capaian kinerja Jumlah Dokumen Regulasi penanggulangan Bencana di daerah dengan target kinerja sejumlah 2 dan realisasinya 9 atau capaian kinerja sebesar 450 % , melebihi target .
- 6) Capaian kinerja Persentase Pemenuhan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dengan target kinerja sebesar 12,2 dan realisasinya 9,66 atau capaian kinerja sebesar 79 % target kinerja belum tercapai.
- 7) Capaian kinerja Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100 % , Target kinerja tercapai.
- 8) Capaian kinerja Jumlah pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran dengan target kinerja sebesar 10 Kelompok dan realisasinya 2 Kelompok atau capaian kinerja sebesar 20,target kinerja belum tercapai.
- 9) Capaian kinerja Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dengan target sebesar 100 % dan realisasinya 100 % atau capaian kinerja sebesar 100%, Target kinerja tercapai.

Capaian kinerja tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 98 % atau terjadi peningkatan kinerja sebesar 2 %

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2022, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kapasitas Aparatur dengan Pendidikan dan Pelatihan.
- 2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan pembentukan dan pembinaan relawan.
- 3) Meningkatkan pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal didaerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya dengan mengoptimalkan dokumen kajian risiko bencana dalam pelaksanaan kegiatan.
- 4) Melakukan pendataan kebutuhan standar pelayanan informasi rawan bencana.
- 5) Menyusun Standarisasi Penyebaran Informasi Bencana.
- 6) Meningkatkan pengadaan dan pemasangan papan rambu informasi, peringatan dan larangan bencana yang berstandarisasi
- 7) Memperbaiki tata kelola kegiatan.
- 8) Mengoptimalkan Pelaksanaan dalam tahapan penentuan status Tanggap Darurat ;
- 9) Mengoptimalkan Penerapan sistem komando operasi darurat ;
- 10) Optimalisasi Tim Kaji Cepat;
- 11) Meningkatkan ketersediaan peralatan dan logistik kebencanaan ; dan
- 12) Menerapkan sistem Penyimpanan yang terpadu pada pergudangan Logistik PB.
- 13) Upaya penambahan pos pemadam dan sarana kelengkapannya berstandarisasi di setiap kecamatan atau Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) ;

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Tenggarong, 21 Februari 2022

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara


H. Fida Hurasani, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 197311012000121003

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH															
PERIODE Desember - TAHUN 2022															
1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah															
No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Keluaran	VOLUME/ PAGU		CAPAIAN PER TRIWULAN								TOTAL			STATUS PELAKSA NAAN (%)
				I		II		III		IV					
				K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	
1.05.1.05.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota															
1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp200.000.000		Rp58.618.400		Rp39.460.000		Rp63.484.100		Rp36.074.900		Rp197.637.400		98,82%	
1	1.05.01.2.01.01.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen	3	Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	7	Dokumen	100,00%	100,00%
1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp85.000.000		Rp12.942.900		Rp6.420.000		Rp53.194.000		Rp12.358.100		Rp84.915.000		99,90%	
2	1.05.01.2.01.06.01 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	11	Laporan	12	Laporan	100,00%	100,00%
1.05.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp137.025.000		Rp0		Rp0		Rp120.815.000		Rp14.100.000		Rp134.915.000		98,46%	
3	1.05.01.2.01.07.01 Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	100,00%	100,00%
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															

1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp12.557.249.574		Rp2.956.647.627		Rp3.258.662.318		Rp3.295.566.924		Rp2.289.101.466		Rp11.799.978.335		93,97%	
4	1.05.01.2.02.01.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.360	Orang/Bulan	326	Orang/Bulan	343	Orang/Bulan	343	Orang/Bulan	348	Orang/Bulan	1.360	Orang/Bulan	100,00%	100,00%
1.05.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Rp75.563.000		Rp12.060.000		Rp10.050.000		Rp24.095.000		Rp26.946.500		Rp73.151.500		96,81%	
5	1.05.01.2.02.03.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	3	Dokumen	0	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	9	Dokumen	75,00%	100,00%
1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Rp388.170.000		Rp15.650.000		Rp81.113.500		Rp88.356.500		Rp192.744.400		Rp377.864.400		97,35%	
6	1.05.01.2.02.07.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	5	Laporan	14	Laporan	100,00%	100,00%
1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Rp200.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp192.590.900		Rp192.590.900		96,30%	
7	1.05.01.2.05.02.01 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	650	paket	0	paket	0	paket	0	paket	550	Paket	550	paket	84,62%	100,00%
1.05.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp100.000.000		Rp3.350.000		Rp0		Rp0		Rp92.042.000		Rp95.392.000		95,39%	
8	1.05.01.2.05.10.01 Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	200	orang	50	orang	0	orang	75	orang	75	Orang	200	orang	100,00%	100,00%
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah															

1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp10.500.000		Rp0		Rp0		Rp5.700.000		Rp4.800.000		Rp10.500.000		100,00%		
9	1.05.01.2.06.01.01 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	Paket	0	Paket	0	Paket	55	Paket	100	Paket	155	Paket	155,00%	100,00%	
1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp210.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp209.242.770		Rp209.242.770		99,64%		
10	1.05.01.2.06.02.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.70 0	Paket	0	Paket	0	Paket	1.70 0	Paket	0	Paket	1.70 0	Paket	100,00%	100,00%	
1.05.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Rp50.000.000		Rp0		Rp0		Rp6.000.000		Rp43.840.000		Rp49.840.000		99,68%		
11	1.05.01.2.06.03.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	120	Paket	0	Paket	0	Paket	65	Paket	55	Paket	120	Paket	100,00%	100,00%	
1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp125.000.000		Rp0		Rp18.464.000		Rp34.573.000		Rp24.590.000		Rp77.627.000		62,10%		
12	1.05.01.2.06.04.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.50 0	paket	0	paket	0	paket	1.24 5	paket	605	Paket	1.85 0	paket	74,00%	100,00%	
1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp70.000.000		Rp0		Rp0		Rp18.000.000		Rp51.980.000		Rp69.980.000		99,97%		
13	1.05.01.2.06.05.01 Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	7.50 0	Paket	0	Paket	0	Paket	3.01 0	Paket	4.49 0	Paket	7.50 0	Paket	100,00%	100,00%	
1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp706.387.512		Rp0		Rp93.296.699		Rp175.844.709		Rp437.230.527		Rp706.371.935		100,00%		
14	1.05.01.2.06.09.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	20	Laporan	6	Laporan	26	Laporan	40,00%	100,00%	

1.05.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp55.000.000		Rp0		Rp2.048.000		Rp1.200.000		Rp45.110.000		Rp48.358.000		87,92%	
15	1.05.01.2.06.10.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	125	Dokumen	0	Dokumen	30	Dokumen	100	Dokumen	0	Dokumen	130	Dokumen	104,00%	100,00%
1.05.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Rp50.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp36.300.000		Rp36.300.000		72,60%	
16	1.05.01.2.06.11.01 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	4	Dokumen	3	Dokumen	7	Dokumen	58,33%	100,00%
1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
1.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp2.264.764.108		Rp0		Rp0		Rp0		Rp2.197.317.950		Rp2.197.317.950		97,02%	
17	1.05.01.2.07.06.01 Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	75	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	75	Unit	75	Unit	100,00%	100,00%
1.05.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp460.000.000		Rp0		Rp0		Rp50.433.220		Rp402.779.910		Rp453.213.130		98,52%	
18	1.05.01.2.07.10.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tersedia	61	Unit	0	Unit	0	Unit	8	Unit	53	Unit	61	Unit	100,00%	100,00%
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp5.000.000		Rp0		Rp0		Rp1.500.000		Rp3.440.000		Rp4.940.000		98,80%	
19	1.05.01.2.08.01.01 Jumlah layanan surat menyurat	75	Lembar	0	Lembar	0	Lembar	40	Lembar	25	Lembar	65	Lembar	86,67%	100,00%
1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp363.000.000		Rp29.465.836		Rp47.412.723		Rp85.561.215		Rp62.921.792		Rp225.361.566		62,08%	

20	1.05.01.2.08.02.01 Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12	Bulan	3	Bulan	0	Bulan	3	Bulan	3	Bulan	9	Bulan	75,00%	100,00%
1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp4.140.520.196		Rp580.900.616		Rp1.194.763.805		Rp1.053.913.943		Rp1.274.694.425		Rp4.104.272.789		99,12%	
21	1.05.01.2.08.04.01 Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12	Bulan	3	Bulan	0	Bulan	1	Bulan	5	Bulan	9	Bulan	75,00%	100,00%
22	1.05.01.2.08.04.02 Jumlah PenyediaanJasa Tenaga Pendukung Non PNS	2.48 4	Orang/Bul an	0	Orang/Bul an	62 1	Orang/Bul an	207	Orang/Bul an	828	Orang/Bul an	1.65 6	Orang/Bul an	66,67%	100,00%
1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp875.000.000		Rp0		Rp192.176.910		Rp167.792.649		Rp511.096.568		Rp871.066.127		99,55%	
23	1.05.01.2.09.02.01 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak	90	unit	0	unit	0	unit	48	unit	31	Unit	79	unit	87,78%	100,00%
1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp80.000.000		Rp0		Rp16.000.000		Rp45.770.000		Rp12.630.000		Rp74.400.000		93,00%	
24	1.05.01.2.09.06.01 Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	60	unit	20	unit	0	unit	13	unit	7	Unit	40	unit	66,67%	100,00%
1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp256.170.842		Rp0		Rp0		Rp0		Rp242.191.800		Rp242.191.800		94,54%	
25	1.05.01.2.09.09.01 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3	unit	0	unit	0	unit	0	unit	3	Unit	3	unit	100,00%	100,00%
RATA-RATA													89,95%	100,00%	
PREDIKAT													TINGGI	SANGAT	

TINGGI

1.05.1.05.03
Program Penanggulangan Bencana
1.05.03.2.01
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		Rp700.546.000		Rp3.460.000		Rp0		Rp42.084.000		Rp536.745.781		Rp582.289.781		83,12%		
26	1.05.03.2.01.02.01 Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Ting	200	orang	0	orang	0	orang	15	orang	185	orang	200	orang	100,00%	100,00%	
1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																
1.05.03.2.02.02 Pelatihan Dan Pencegahan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Rp254.216.000		Rp5.800.000		Rp0		Rp38.164.000		Rp179.208.000		Rp223.172.000		87,79%		
27	1.05.03.2.02.02.01 Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	150	orang	0	orang	0	orang	15	orang	150	orang	165	orang	110,00%	100,00%	
1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Rp25.238.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp25.174.480		Rp25.174.480		99,75%		
28	1.05.03.2.02.03.01 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00%	100,00%	

	Terhadap Bencana Kabupaten/Kota												
	1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Dan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp175.000.000		Rp0		Rp0		Rp5.484.500		Rp48.250.000		Rp53.734.500	30,71%
29	1.05.03.2.02.04.01 Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	200 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	150 Unit	150 Unit			75,00%	100,00%
	1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Rp200.000.000		Rp10.500.000		Rp35.000.000		Rp31.100.000		Rp105.606.684		Rp182.206.684	91,10%
30	1.05.03.2.02.06.01 Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	6 desa/kel	0 desa/kel	2 desa/kel	2 desa/kel	2 desa/kel	2 desa/kel	2 desa/kel	6 desa/kel			100,00%	100,00%
	1.05.03.2.02.07 Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Rp179.840.000		Rp8.400.000		Rp12.950.000		Rp21.009.000		Rp55.045.000		Rp97.404.000	54,16%
31	1.05.03.2.02.07.01 Jumlah Penanganan Pasca Bencana	50 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	4 kejadian	1 Kejadian	5 kejadian				10,00%	100,00%
	1.05.03.2.02.09 Penyusunan Rencana Kontijensi	Rp300.000.000		Rp400.000		Rp0		Rp0		Rp208.738.280		Rp209.138.280	69,71%
32	1.05.03.2.02.09.01 Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen			0,00%	100,00%
1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana													
	1.05.03.2.03.01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Rp50.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0	0,00%
33	1.05.03.2.03.01.01 Jumlah laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			100,00%	100,00%

	Prioritas														
	1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Rp150.000.000		Rp0		Rp18.010.000		Rp0		Rp130.663.020		Rp148.673.020		99,12%	
34	1.05.03.2.03.02.01 SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	100,00%
	1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp450.000.000		Rp0		Rp63.460.000		Rp42.580.000		Rp267.015.840		Rp373.055.840		82,90%	
35	1.05.03.2.03.03.01 jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	50	Kejadian	56	Kejadian	19	Kejadian	17	Kejadian	26	Kejadian	118	Kejadian	236,00%	100,00%
	1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp600.000.000		Rp0		Rp4.880.000		Rp21.351.000		Rp568.788.840		Rp595.019.840		99,17%	
36	1.05.03.2.03.04.01 Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Distribusikan Logistik penyelamatan dan Evakuasi korban bencana	30	orang	5	orang	5	orang	20	orang	7	Orang	37	orang	123,33%	100,00%
37	1.05.03.2.03.04.02 Jumlah Logistik untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana	50	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	50	Unit	50	Unit	100,00%	100,00%
	1.05.03.2.03.05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Rp100.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp97.993.050		Rp97.993.050		97,99%	
38	1.05.03.2.03.05.01 Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00%	100,00%

1.05.03.2.03.06 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit		Rp200.000.000		Rp0		Rp0		Rp49.488.000		Rp21.849.000		Rp71.337.000		35,67%		
39	1.05.03.2.03.06.01 SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan Paling lama 1 x 24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemi Terpadu	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%		100,00%
1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana																
1.05.03.2.04.01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Rp418.088.400		Rp24.799.000		Rp6.270.000		Rp1.500.000		Rp94.070.400		Rp126.639.400		30,29%		
40	1.05.03.2.04.01.01 jumlah Dokumen Penyusunan perub RAD PB, sumber daya bantuan PB dll.	3	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00%		100,00%
1.05.03.2.04.02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota		Rp271.310.400		Rp14.858.000		Rp3.390.000		Rp31.865.000		Rp123.425.000		Rp173.538.000		63,96%		
41	1.05.03.2.04.02.01 Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	4	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	3	Dokumen	4	Dokumen	100,00%		100,00%
1.05.03.2.04.03 Kerjasama Antar Lembaga Dan kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Rp268.115.600		Rp21.925.000		Rp2.850.000		Rp29.040.000		Rp93.630.000		Rp147.445.000		54,99%		
42	1.05.03.2.04.03.01 jumlah kegiatan peningkatan sinergi antar lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.	3	kegiatan	0	kegiatan	0	kegiatan	2	kegiatan	1	Kegiatan	3	kegiatan	100,00%		100,00%
1.05.03.2.04.04 Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		Rp750.000.000		Rp18.160.000		Rp3.151.000		Rp97.968.600		Rp458.647.450		Rp577.927.050		77,06%		
43	1.05.03.2.04.04.01 Sistim informasi geografis (SIG).	2	unit	0	unit	0	unit	0	unit	2	Unit	2	unit	100,00%		100,00%

1.05.03.2.04.05 Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		Rp150.000.000		Rp0		Rp3.663.000		Rp50.659.273		Rp40.276.000		Rp94.598.273		63,07%		
44	1.05.03.2.04.05.01 1.Pengawasan sumber ancaman / bahaya.2 pengawasan kegiatan rancang bangun dan tata ruang.3 pengawasan pengelolaan keuangan / pendanaan penanggulangan bencana.4 pengawasan kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana. 5. pengawasan kegiatan rek	3	kegiatan	0	kegiatan	0	kegiatan	1	kegiatan	2	kegiatan	3	kegiatan	100,00%	100,00%	
RATA-RATA													92,33%	100,00%		
PREDIKAT													SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI		
1.05.1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran																
1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																
1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Rp825.000.000		Rp3.460.000		Rp77.688.000		Rp179.201.800		Rp453.094.640		Rp713.444.440		86,48%		
45	1.05.04.2.01.02.01 Jumlah Laporan Kasus Kebakaran yang tertangani	12	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	12	Laporan	100,00%	100,00%	
1.05.04.2.01.03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi		Rp200.000.000		Rp38.385.000		Rp0		Rp0		Rp98.870.000		Rp137.255.000		68,63%		
46	1.05.04.2.01.03.01 jumlah laporan korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi teradap kejadian kebakaran	12	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	12	Laporan	100,00%	100,00%	

1.05.04.2.01.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri		Rp690.039.638		Rp0		Rp0		Rp669.650.060		Rp0		Rp669.650.060		97,05%		
47	1.05.04.2.01.06.01 jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri	122	Unit	0	Unit	0	Unit	122	Unit	0	Unit	122	Unit	100,00%		100,00%
1.05.04.2.01.07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		Rp125.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp123.166.216		Rp123.166.216		98,53%		
48	1.05.04.2.01.07.01 Jumlah Aparatur Pemadam yang dibina	8	orang	0	orang	0	orang	0	orang	8	orang	8	orang	100,00%		100,00%
1.05.04.2.01.09 Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, Dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		Rp200.000.000		Rp0		Rp47.447.500		Rp50.370.000		Rp101.029.391		Rp198.846.891		99,42%		
49	1.05.04.2.01.09.01 Terwujudnya kerjasama antar wilayah perbatasan	5	kegiatan	0	kegiatan	0	kegiatan	0	kegiatan	5	Kegiatan	5	kegiatan	100,00%		100,00%
1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran																
1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat		Rp200.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp182.787.000		Rp182.787.000		91,39%		
50	1.05.04.2.04.01.01 Jumlah Kelompok /Relawan Pemadam Kebakaran	4	kelompok	0	kelompok	0	kelompok	0	kelompok	4	kelompok	4	kelompok	100,00%		100,00%
1.05.04.2.04.02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam kebakaran		Rp200.000.000		Rp0		Rp0		Rp56.297.000		Rp121.123.000		Rp177.420.000		88,71%		
51	1.05.04.2.04.02.01 Jumlah Kelompok /Relawan Pemadam Kebakaran yang dibentuk	2	Balakar	0	Balakar	0	Balakar	0	Balakar	2	Balakar	2	Balakar	100,00%		100,00%

1.05.04.2.04.03 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat / Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana Dan Prasarana		Rp1.145.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp923.220.370		Rp923.220.370		80,63%		
52	1.05.04.2.04.03.01 Jumlah Sarana Dan Prasarana Pemadam Kebakaran	23	unit	0	unit	0	unit	0	unit	23	Unit	23	unit	100,00%	100,00%	
1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia																
1.05.04.2.05.03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi		Rp200.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp191.310.028		Rp191.310.028		95,66%		
53	1.05.04.2.05.03.01 Jumlah Saprns Pencarian dan Pertolongan	190	unit	0	unit	0	unit	0	unit	190	Unit	190	unit	100,00%	100,00%	
RATA-RATA													100,00%	100,00%		
PREDIKAT													SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI		

**Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2022**

Jenis Layanan Dasar	Mutu Pelayanan	Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian	Jumlah Yang Mutu Pelayanan	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian
Kategori Bencana Daerah				49,46%			46,12%			48,75%			66,38%
Pelayanan Informasi Rawan Bencana				10,85%			10,85%			13,48%			13,92%
Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		734.609	1.350	0,18%	734.609	1.350	0,18%	734.609	25.050	3,41%	734.609	27.145	3,70%
Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)				53,54%			53,54%			53,78%			54,81%
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%

Jenis Layanan Dasar	Mutu Pelayanan	Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian	Jumlah Yang Mutu Pelayanan	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian
	Risiko Bencana												
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	160	160	100,00%	160	160	100,00%	160	160	100,00%	160	160	100,00%
	3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	19.267	5.638	29,26%	19.267	5.638	29,26%	19.267	6.013	31,21%	19.267	3.650	18,94%
	4. Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	1.350	270	20,00%	1.350	270	20,00%	1.350	495	36,67%	1.350	495	36,67%
	5. Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	38	7	18,42%	38	7	18,42%	8.800	92	1,05%	38	7	18,42%
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap				37,54%			27,50%			32,77%			85,23%

Jenis Layanan Dasar	Mutu Pelayanan	Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian	Jumlah Yang Mutu Pelayanan	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian
Bencana													
Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		87877	19267	21,92%	87877	19267	21,92%	87877	25050	28,51%	27145	27145	100,00%
Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)				100,00%			49,82%			49,82%			26,16%
	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana	-1	-1	100,00%	370	196	52,97%	370	196	52,97%	87.877	4.970	5,66%
	2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	-1	-1	100,00%	15	7	46,67%	15	7	46,67%	15	7	46,67%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100,00%			100,00%			100,00%			100,00%
Persentase Pencapaian		47236	47236	100,00%	56678	56678	100,00%	56908	56908	100,00%	57539	57539	100,00%

Jenis Layanan Dasar	Mutu Pelayanan	Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian	Jumlah Yang Mutu Pelayanan	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian
Penerima Layanan Dasar (80%)													
Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)				100,00%			100,00%			100,00%			100,00%
	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	14.405	14.405	100,00%	16.803	16.803	100,00%	16.899	16.899	100,00%	17.231	17.231	100,00%
	3. Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	-1	-1	100,00%	-1	-1	100,00%	-1	-1	100,00%	-1	-1	100,00%

Jenis Layanan Dasar	Mutu Pelayanan	Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian	Jumlah Yang Mutu Pelayanan	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	62	62	100,00%	88	88	100,00%	110	110	100,00%	158	158	100,00%
*Kategori Kebakaran Daerah				80,98%			76,93%			76,49%			79,13%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran				80,98%			76,93%			76,49%			79,13%
Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		124	104	83,87%	242	191	78,93%	352	276	78,41%	567	463	81,66%
Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)				69,43%			68,96%			68,81%			69,01%

Jenis Layanan Dasar	Mutu Pelayanan	Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian	Jumlah Yang Mutu Pelayanan	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian
	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	15	12	80,00%	32	25	78,13%	40	31	77,50%	60	47	78,33%
	2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	3	3	100,00%	4	4	100,00%	3	3	100,00%	3	3	100,00%
	3. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	24	8	33,33%	24	8	33,33%	24	8	33,33%	24	8	33,33%
	4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	337	217	64,39%	337	217	64,39%	337	217	64,39%	337	217	64,39%

**REKAPITULASI KEJADIAN KEBAKARAN PER KECAMATAN
DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**

No	Kecamatan	Jumlah Kejadian	KERUSAKAN									KORBAN		KONDISI KORBAN					Ket
			Rumah Selamat	Rumah Rusak Ringan	Rumah Rusak Sedang	Rumah Rusak Berat/Musnah	Kantor	Sekolah	Tempat Ibadah	Kendaraan	Bangunan Lainnya	KK	JIWA	SELAMAT	LUKA RINGAN	LUKA BERAT	MENING GAL	CACAT PERMANEN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tenggarong	8	0	0	2	34	0	0	0	1	0	38	135	135	0	0	0	0	
2	Tenggarong Seberang	13	0	3	1	7	0	0	0	2	2	15	50	50	0	0	0	0	
3	Loa Kulu	2	0	0	0	15	0	0	0	0	0	13	34	34	0	0	0	0	
4	Loa Janan	6	0	0	0	5	0	1	0	1	1	7	20	20	0	0	0	0	
5	Sangasanga	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	
6	Anggana	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	3	11	11	0	0	0	0	
7	Muara Badak	4	0	0	0	11	0	0	0	0	0	12	52	52	0	0	0	0	
8	Marangkayu	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	
9	Samboja	6	0	1	0	9	0	0	0	0	0	12	40	39	0	0	1	0	
10	Muara Jawa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Sebulu	5	0	2	0	18	0	0	0	0	1	28	88	88	0	0	0	0	
12	Muara Kaman	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	14	14	0	0	0	0	

No	Kecamatan	Jumlah Kejadian	KERUSAKAN									KORBAN		KONDISI KORBAN				Ket	
			Rumah Selamat	Rumah Rusak Ringan	Rumah Rusak Sedang	Rumah Rusak Berat/Musnah	Kantor	Sekolah	Tempat Ibadah	Kendaraan	Bangunan Lainnya	KK	JIWA	SELAMAT	LUKA RINGAN	LUKA BERAT	MENING GAL		CACAT PERMANEN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13	Kota Bangun	4	0	4	0	18	0	0	1	0	2	21	79	79	0	0	0	0	
14	Muara Muntai	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	10	10	0	0	0	0	
15	Muara Wis	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	5	5	0	0	0	0	
16	Kenohan	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	12	12	0	0	0	0	
17	Kembang Janggut	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	15	15	0	0	0	0	
18	Tabang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
J U M L A H		60	0	10	3	132	0	1	1	6	6	165	567	566	0	0	1	0	

**DAFTAR REKAPITULASI DATA BENCANA BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2022
DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

No.	Jenis Bencana/ Kejadian	Banyaknya Kejadian	Jumlah Korban				Korban Meninggal	Hutan/Lahan/ Kebun (Ha)	Taksiran Kerugian (Rp)
			Kendaraan	Bangunan	Jiwa	KK			
1	Kebakaran Pemukiman	20	1	80	272	96		± Rp. 1.850.000.000,-	
2	Kebakaran lahan	2							
3	Tanah Longsor	3		3	10	3	6x10 (jalan poros)		
4	Angin Puting Beliung	1		13	44	11		± Rp. 720.000.000,-	
5	Banjir	73		8.380	57.148	17.069	750 ha		
6	Kecelakaan Udara								
7	Kecelakaan Air	6			13	9			
8	Orang Hilang & Tenggelam	26			41	38	16		
9	Pohon Tumbang	21							
10	Lain-Lain (GULMA)	6		5	11	5	1		
	Jumlah	158	1	8.481	57.539	17.231	17	± Rp. 2.570.000.000,-	

Tenggarong, 31 DESEMBER 2022
Kabid. Kedaruratan Dan Logistik

ABDUL S. SOS

Nip. 19730515 200012 1 001

**REKAPITULASI KEJADIAN BENCANA
DALAM WILAYAH KUTAI KARTANEGARA
UNTUK BULAN JANUARI s/d DESEMBER 2022**

NO	KECAMATAN	JENIS BENCANA													Jmlh Kej. Benc.Per Kec	KET
		Kebakaran Pemukiman	Kebakaran Lahan	Tanah Longsor	Banjir	Angin Puting Belulang	Kecelakaan Trans. Air	Kecelakaan Trans. Udara	Orang Hilang / Tenggelam	Konflik Sosial	Pohon Tumbang	Gempa Bumi	Tsunami	Lain-Lain		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Tenggarong	7		1					5		18			4	35	
2	Tenggarong Seberang	4									2				6	
3	Loa Kulu	1									2				3	
4	Loa Janan	1			2		1		6						10	
5	Sanga-Sanga														0	
6	Anggana						1		5					1	7	
7	Muara Badak				4										4	
8	Marang Kayu			1	2										3	
9	Samboja				1				1						2	
10	Muara Jawa							1	1						2	
11	Sebulu	4		1	1			1	2						9	
12	Muara Kaman	1	1		18			1	4						25	
13	Kota Bangun	1	1		3			1	1						7	
14	Muara Muntai													1	1	
15	Muara Wis	1			5	1									7	
16	Kenohan				3										3	
17	Kembang Janggut				27				1						28	
18	Tabang				6										6	
Jmlh keseluruhan jenis bencana di kecamatan Kutai Kartanegara		20	2	3	72	1	6	0	26	0	22	0	0	6	158	

Tenggarong, 31 DESEMBER 2022
Kabid. Kedaruratan Dan Logistik

ABDAL S. SOS
Nip. 19730515 200012 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wolter Monginsidi Telp. (0541) 661031 - 661029 - 662088 Fax. 662056 Kode Pos 75511

TENGGARONG

Tenggarong, 13 Februari 2023
 Kepada Yth.

Nomor : 180.19/HK-PERUU/II/2023

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
 KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

Sifat : Segera

Lamp : 1 (satu)

Di-

Perihal : Permintaan Harmonisasi Raperkada
 Kutai Kartanegara

Samarinda

Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka bersama ini kami menyampaikan 9 (sembilan) buah rancangan Peraturan Kepala Daerah untuk dapat dilakukan Harmonisasi sebelum difasilitasi. Adapun 9 (sembilan) buah rancangan Peraturan Kepala Daerah sebagai berikut:

1.	Raperbup Tata Caca dan Tahapan Sanksi Administrasi
2.	Raperbup Partisipasi Masyarakat Dalam Penyediaan Keuangan Untuk Penanggulangan Bencana
3.	Raperbup Peran Serta Masyarakat dan Lembaga Usaha Dalam Penanggulangan Bencana
4.	Penyelenggaraan Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara
5.	Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Kutai Kartanegara
6.	Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara
7.	Status Keadaan Darurat Bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara
8.	Persyaratan Standar Teknis Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara
9.	Standar Kualifikasi Aparatur Kebencanaan Kabupaten Kutai Kartanegara

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya dan perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
 ASSISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
 AKHMAD TAUFIK HIDAYAT

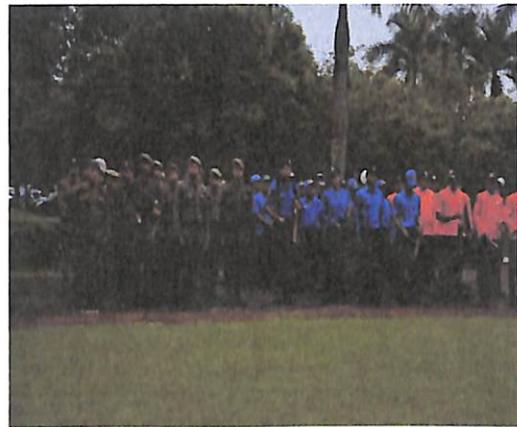
Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Wakil Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Arsip.



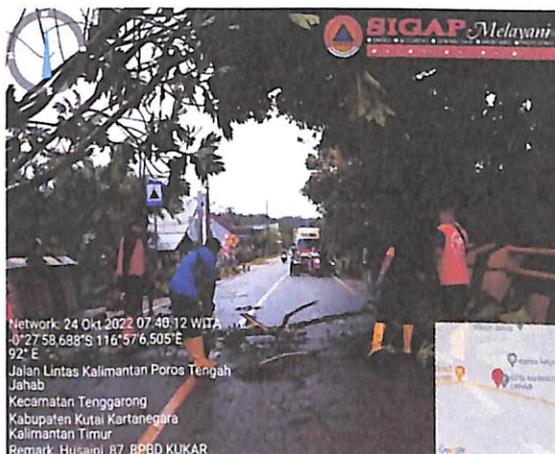
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSSE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dokumentasi Pra Bencana





Dokumentasi Kegiatan Tanggap Darurat



MARI KITA TINGKATKAN KEWASPADAAN TERHADAP ANCAMAN KEBAKARAN BAIK KEBAKARAN PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN

HIMPADA SELURUH KOMPONEN MASYARAKAT KABUPATEN KUTAI KADANGKALANYA AGAR MENINGKATKAN KEWASPADAAN DINI DENGAN CARA

SIAGA BAHAYA KEBAKARAN

1. Sebelum tidur atau meninggalkan rumah pastikan elektronik kompor dalam keadaan aman

2. Bahan-bahan yang mudah terbakar seperti tabung gas, oksigen, peralatan las dan bahan berbahaya lainnya agar diletakkan pada tempat yang aman, dan puntung rokok dipastikan mati total.

3. Hindari menambun bahan-bahan lain pemicu kebakaran di rumah



Dokumentasi Kegiatan Pasca Bencana



Dokumentasi Kegiatan Pemadam Kebakaran

